



## Menyoal Sampah Berbayar

PEMERINTAH Kota Yogyakarta menguji coba sistem sampah berbayar (*pay-as-you-throw*) pada 29 Oktober-4 November 2024, yang diperpanjang pada 5 dan 7 November lalu. Selama uji coba, warga hanya menimbang sampah di depo. Retribusi berbasis berat akan diterapkan jika sistem ini kelak berlaku.

Secara konseptual, sistem sampah berbayar adalah manifestasi *government by market*, tatakelola pemerintahan berbasis mekanisme pasar (Kamark, 2007). Dalam model ini, pemerintah menggunakan otoritasnya untuk menciptakan ihargai sampah guna membentuk perilaku bersampah yang rasional.

Uji coba ini bukan sekadar penja-jakan kebijakan. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup bersama tim konsultan tengah mengkaji data berat, jenis sampah, dan retribusi dari uji coba tersebut. Hasilnya akan menjadi dasar rancangan peraturan daerah yang di-rencanakan dibahas pada 2025.

Kronisnya masalah sampah dan tata kelolanya yang buruk memang membutuhkan solusi drastis. Setelah berkali-kali darurat sampah mendera, langkah Pemkot ini patut diapresiasi. Tetapi, walau banyak studi di Eropa dan Amerika Serikat menunjukkan efektivitas sistem sampah berbayar dalam meningkatkan kesadaran warga, mengurangi sampah tak terpilah, dan menekan jumlah total sampah, telaah kritis tetap diperlukan sebagai perspektif sandingan.

Pertama, cara mempermasalahkan (Bacchi, 2009) sampah dalam sistem ini mengasumsikan bahwa keputusan individu terkait perilaku konsumsi adalah penyebab utama masalah sampah. Padahal, dari mandi hingga makan malam, pilihan produk yang minim sampah kertas, plastik, atau *styrofoam* sangat terbatas. Artinya, cara seseorang bersampah dipengaruhi oleh beragam faktor eksternal yang dibentuk oleh lingkungan kebijakan publik. Karena itu, fokus penyelesaian masalah sampah di level individu sejatinya kurang tepat sasaran.

Yang lebih mendesak adalah pemeliharaan kebijakan (*policy maintenance*)

Ashari Cahyo Edi

untuk menciptakan lanskap kebijakan (*polyscape*) yang membentuk perilaku hidup, pola produksi, dan seterusnya dalam kerangka ekonomi sirkular (Mettler, 2016). Agar beragam kebijakan publik baik yang langsung terkait sampah maupun tidak, dapat saling berinteraksi menghasilkan praktik kehidupan yang berwawasan lingkungan. Sayangnya, tanpa disadari, ide sampah berbayar justru menggeser lokus tanggung jawab dalam pemeliharaan kebijakan ini dari para pembuat kebijakan.

Kedua, memproblematisasi sampah sebagai masalah individu berisiko mengalihkan perhatian dari akar politik krisis sampah. Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan inovasi, teknologi, edukasi warga, dan insentif bagi produsen dan konsumen, yang membutuhkan kerja politik untuk menyepakati prioritas program dan anggaran serta pengalihan sumber daya publik lainnya. Ironisnya, setiap kali krisis sampah berulang, berulang pula kegagalan eksekutif dan legislatif di daerah maupun pusat membangun konsensus politik.

Ide sampah berbayar berisiko mengubah cara orang memahami masalah sampah. Masalah sampah, yang semula politis sebagai kompetisi dan kontestasi kebijakan, berisiko menjadi apolitis, sekadar persoalan keputusan individual dalam pengelolaannya (Strach, 2016). Dengan kata lain, gagasan ini berisiko mendepolitisasi pengelolaan sampah.

Terakhir, sistem sampah berbayar mengandung dilema akuntabilitas terkait prinsip etis keadilan. Sistem ini mengandalkan mekanisme pasar, di mana warga diharapkan bertindak rasional dengan memilah dan mengurangi sampah. Jika keberhasilan hanya diukur dari berkurangnya volume sampah, kebijakan ini berpotensi

menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi warga rentan/miskin yang terbatas daya belinya.

Ketika sistem ini tidak berlaku di sekitar Kota Yogyakarta dan perbedaan ihargai sampah terlalu besar, risiko *illegal dumping* akan meningkat. Warga rentan/miskin yang membuang sampah sembarangan berisiko dihukum denda dan stigma sosial (Schneider & Ingram, 1997). Alhasil, sistem ini menciptakan dilema akuntabilitas: antara keberhasilan yang diukur dari berkurangnya volume sampah versus keberhasilan yang diukur dari kinerja keadilan sistem dalam memberi perlakuan terhadap khusus warga rentan/miskin.

Memungkas tiga telaah kritis di atas, saat ini kiranya terlalu dini untuk menerima atau menolak gagasan sampah berbayar. Analisis ini bertujuan meningkatkan literasi warga dan memperkaya wacana publik tentang kebijakan persampahan. Kebijakan yang didiskusikan dan diuji secara publik, serta disesuaikan dengan konteks lokal, cenderung lebih mudah diterima masyarakat dan mendapatkan legitimasi politik yang kuat. □-d

\*) Ashari Cahyo Edi SIP MPA MA,  
Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan,  
FISIPOL UGM.

| Instansi                  | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|---------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Lingkungan Hidup | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 09 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005